



BAB IV

ANALISIS RELASI ISLAM DAN NEGARA MENURUT PEMIKIRAN K.H. ACHMAD SIDDIQ

A. Analisis Relasi Islam dan Negara Bangsa

Gagasan Soekarno, bahwa agama dapat dan harus dipisahkan dari negara dan pemerintahan, sebab agama merupakan aturan-aturan spiritual (akhirat dan negara adalah masalah duniawi (sekular) ¹⁶⁰ itu dimulai pada tahun dasawarsa. Yang merupakan “dasawarsa ideologi” dalam sejarah modern Indonesia. Di masa ini pulalah berbagai jenis ideologi, yang kemudian akan berpengaruh dalam pertumbuhan keagamaan dan dasar ideologi perjuangan. ¹⁶¹

Sedangkan menurut Natsir sangat meyakini kebenaran Islam sebagai suatu ideologi kenegaraan. ¹⁶² Barulah pola perjuangan ini dimulai Syarikat Dagang Islam (SDI) pada tanggal 16 Oktober 1905 di Solo Jawa Tengah ¹⁶³ di bawah pimpinan Samanhudi, lalu menjadi Syarikat Islam di bawah pimpinan Haji Umar Said (HOS) Cokroaminoto dan para cendikiawan muslim lainnya. ¹⁶⁴ Ketika

¹⁶⁰ *Ibid.*, 80.

¹⁶¹ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam*, (Jakarta : Teraju, 2002), 49.

¹⁶² *Ibid.*, 112.

¹⁶³ Abdul Qadir Djaelani, *Peran Ulama*, 83.

¹⁶⁴ M. Mansyur Amin, *Dinamika Islam Sejarah Transformasi dan Kebangkitan*, (Yogyakarta : LKPSM, 1995), 119.

SI terbentuk akhirnya muncul organisasi yang lebih luas, lintas etnis, lintas pulau.¹⁶⁵

Menurut Kiai Sahal menegaskan bahwa, sejak awal berdirinya NU, warga NU yang merupakan bagian dari masyarakat madani berada pada kutub yang berseberangan dengan negara. Sebab, negara tidak perlu mencampuri urusan agama, tetapi hanya mengayomi, membina dan memberi fasilitas untuk semua agama. Soal pancasila, Kiai Sahal menyebut dasar negara Indonesia itu bukan ciri, tetapi visi.¹⁶⁶

Tentang kedudukan Pancasila itu sendiri di hadapan Islam, Kiai Achmad Siddiq menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi dan Islam adalah agama. Ideologi, pada umumnya diartikan berkaitan dengan cita-cita, filsafat, program perjuangan, strategi, sasarannya, dan sebagainya.¹⁶⁷ Sedangkan Islam adalah wahyu Allah, bukan hasil pemikiran manusia, bahkan bukan hasil pemikiran Rasulullah Saw. Islam adalah ‘*wad’u ilahiyyun*,’ ciptaan Allah Swt. Oleh karena itu, agama tidak boleh disetingkatkan dengan ideologi.¹⁶⁸

Dalam hubungan antara agama dan Pancasila, keduanya dapat sejalan, saling menunjang dan saling menguatkan. Keduanya dapat bersama-sama

¹⁶⁵ Dhurorudin Mashad, *Akar Konflik Politik Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), 54.

¹⁶⁶ Andreas dan Fitriatmoko, “*Kiai Jatim Gagal Lepas Mbah Sahal*”, Surya, (25, 01-2014), 1.

¹⁶⁷ Hairus Salim HS dan Ridwan Fakla As, *Biografi lima Rais ‘Am Nahdltul Ulama*, (Yogyakarta : LTN-Nu, 1995), 173.

¹⁶⁸ Choirul Anam, *Pemikiran K.H. Achmad Siddiq*, (Jakarta : PT Duta Aksara Mulia, 1992), 124.

dilaksanakan dan diamalkan, tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan meninggalkan yang lainnya. Karena itu, sangat tepat kebijaksanaan pemerintah bahwa Pancasila tidak akan diagamakan dan agama tidak akan dipancasilakan.¹⁶⁹

Sesungguhnya, banyak faktor yang merupakan modal dasar bagi upaya proporsionalisasi Pancasila dan agama, khususnya Islam, antara lain: (1) Sama-sama berwatak akomodatif, (2) substansi (*mahiyah*) masing-masing sejalan, (3) bangsa Indonesia adalah bangsa beragama.¹⁷⁰

Sehingga benar-benar terbukti bahwa di dalam negara dan masyarakat Pancasila ini agama dapat diamalkan dengan baik dan sebaliknya umat beragama di negari ini merupakan tulang punggung ideologi Nasional Pancasila.¹⁷¹

Meskipun masih ada hambatan bagi proporsionalisasi itu, terutama berwujud hambatan psikologis, yaitu kecurigaan dan kekhawatiran dari dua arah. Dari satu arah, ada kecurigaan dan kekhawatiran bahwa negara Republik Indonesia akan menjadi negara Agama tertentu yang merugikan pemeluk agama lain. Dari arah lain terdapat kecurigaan dan kekhawatiran bahwa Pancasila akan dijadikan semacam agama nasional yang menggantikan atau paling tidak mendangkalkan jiwa agama-agama.

¹⁶⁹ Hairus Salim HS dan Ridwan Fakla As, *Biografi lima Rais 'Am*, 174

¹⁷⁰ Choirul Anam, *Pemikiran K.H. Achmad Siddiq*, 124

¹⁷¹ Hairus Salim HS dan Ridwan Fakla As, *Biografi lima Rais 'Am*, 174

Ada tiga pertimbangan tertentu mengapa umat Islam menerima Pancasila. Pertama, umat Islam Indonesia (melalui para pemimpinnya) ikut aktif dalam perumusan dan kesepakatan tentang Dasar Negara itu. Sembilan tokoh utama bangsa yang terkenal dengan Panitia Sembilan, berhasil menyusun rancangan rumusan yang ketika itu disetujui oleh semua pihak dan akan dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara (Piagam Jakarta), yang lalu diterima dan disahkan dalam sidang pleno BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945.

Kedua, secara substansial nilai-nilai luhur yang dirumuskan menjadi dasar negara itu dapat disepakati dan dapat dibenarkan menurut pandangan Islam. misalnya, sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan Tauhid (monoteisme murni) menurut akidah Islam (al-Qur'an surah al-ikhlas). Demikian pula mengenai empat sila berikutnya. Kalau ditampilkan satu persatu maka tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama (khususnya Islam). Bahkan urutan-urutan Pancasila itu dapat dibaca dalam kerangka '*aamanu wa amilus shalihah*.' Kalau soal pertama dianggap sebagai pencerminan '*aamanu* maka kiranya tidak terlalu keliru kalau empat sila berikutnya dapat mencerminkan '*amilus shalihah*.'

Ketiga, umat Islam berkepentingan dengan memantapkan peranan agama dalam penghayatan dan pengamalan ideologi nasional dan sebaliknya negara Pancasila agama terhayati dan teramalkan secara lebih baik. Bukan hanya karena mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam, tetapi karena pada diri Islam sendiri memuat dan membawa nilai-nilai luhur yang bersumber pada wahyu yang dapat memberi kontribusi bagi pembangunan Nasional dan dalam Pembinaan Hukum

Nasional.¹⁷² Selain dari ketiga tersebut, Nahdlatul Ulama menerima Pancasila menurut bunyi dan makna yang terkandung di dalam Undang-Undang 1945 (*bil lafzi wal ma'na murad*), dengan rasa tanggung jawab dan tawakkal kepada Allah.¹⁷³

Dalam negara Pancasila, negara mempunyai peranan penting dalam pembangunan di berbagai sektor, termasuk pembangunan dalam pembangunan sektor agama dan sebaliknya juga agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara.¹⁷⁴

Walaupun negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, di mana sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa tidak berarti bahwa negara Indonesia adalah negara teokrasi atau negara berdasarkan atas suatu agama tertentu. Sebagai bangsa yang beragama, kita menghendaki dan berkeinginan dalam rangka melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, agar nilai-nilai agama (khususnya nilai-nilai luhur Dinul Islam) benar-benar dapat menjiwai kehidupan kita, dihayati dan diamalkan oleh masyarakat dan insan Pancasila sebagai manifestasi dan pencerminan taqwanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa.¹⁷⁵

¹⁷² *Ibid.*, 175.

¹⁷³ Choirul Anam, *Pemikiran K.H. Achmad Siddiq*, 71.

¹⁷⁴ *Ibid.*, 113.

¹⁷⁵ *Ibid.*, 113.



Pasti terdapat sinkronisme penuh antara sunnatullah dan Dinullah, sehingga perjalanan dan perkembangan seluruh alam ini tidak terlepas dari garis “Skenario dan Pengendalian Agung” (Qadla dan Qadar) menuju sasaran yang sudah ditetapkan-Nya pula, yaitu *rahmatan li al-‘amin*, dan oleh karena itu Dinullah bersifat universal.¹⁷⁶

Adapun karakteristik agama Islam yang paling esensial adalah: (1) prinsip *al-tawassut*, jalan pertengahan, tidak *tatarruf* (ekstrem), kekanan-kananan atau kekiri-kirian; (2) sasarannya adalah *rahmatan li al-‘amin*.¹⁷⁷ Sesuai dengan “Strategi dan Skenario Agung.” Sinkronisme antara sunnatullah dan Dinullah ini berkelanjutan dengan sifat/watak “fitri” pada Islam. (Q.S. Rum: 30). Yaitu, bahwa Islam itu sejalan dengan nilai-nilai/kecenderungan-kecendrungan yang positif yang sudah ada pada manusia sejak aslinya.

Logislah kalau Islam mengakui adanya nilai-nilai positif yang mungkin sudah tumbuh dan sudah ada pada manusia atau kelompok manusia sebelum menerima ajaran Islam. terhadap nilai-nilai “lama” ini Islam tidak bersikap apriori menolak, menentang dan menghapusnya sama sekali, tetapi Islam bersikap akomodatif, selektif dan proporsional.¹⁷⁸

¹⁷⁶ *Ibid.*, 114.

¹⁷⁷ Samsul Munir Amin, *Percik Pemikiran Para Kiai*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2009), 129.

¹⁷⁸ Choirul Anam, *Pemikiran K.H. Achmad*, 115

Oleh sebab itu, langkah pembinaan *Khairah Ummah* dalam masyarakat Pancasila, *Ahlusunnah Wal Jamaah* adalah *amar ma'ruf Nahi Mungkar* sebagai¹⁷⁹ yang sifat-sifat *Khairah Ummah*, yaitu: taqwa yang penuh utuh dan mantab, (penuh, utuh: *haqqa tuqaatih*, mantab, tak tergoyahkan, terbawa sampai mati), berpegang teguh kepada ajaran-ajaran (Agama) Allah, tidak menempuh jalan simpangan, bersatu padu, dengan ikatan aqidah, melakukan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.¹⁸⁰

Kalaupun aturan-aturan negara dibuat dengan “wajah” yang memuat prinsip-prinsip Islam secara formal hal itu belum tentu dapat menjamin munculnya kebaikan bersama (*mabadi' khairah ummah*). Akan tetapi tidak semua Kiai bahwa agama dan negara yang coraknya simbiotik. Seperti K.H. Syarif Djamhari yang berpandangan bahwa mendirikan negara Islam secara formal adalah suatu kewajiban.¹⁸¹

B. Negara Indonesia Dalam Kajian Aswaja

Ahlusunnah Wal Jamaah, pada zaman Rasulullah sampai kira-kira tiga dasawarsa sesudah wafatnya beliau, semua kaum muslimin adalah *Ahlusunnah* (lengkapnya “*Ahlusunnah Wal Jama'ah*”). Semua masih berada di atas garis yang diajarkan oleh Rasulullah Saw dan diamalkannya bersama para sahabat *ma*

¹⁷⁹ *Ibid.*, 101.

¹⁸⁰ *Ibid.*, 103.

¹⁸¹ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai*, 233

ana ilaihi al-yauma wa ashabih, baik di dalam urusan *hablun minallah* maupun di dalam urusan *hablun minannas*.¹⁸²

Nahdlatul Ulama yang menegaskan dirinya sebagai *Ahlusunnah*, mengambil posisi sebagai salah satu kelompok *Ahlusunnah*. Nahdlatul Ulama yang organisasi Islam, yang segala sikap dan gerak langkahnya selalu bersumber dan berpatokan kepada ajaran Islam, dan justru syari'at Islam inilah yang akan ditegakkan oleh NU.

Konsep Kiai Sahal yang beraliran inklusif substantif menginginkan NU hendaknya berada di tingkat '*high politics*', bukan '*low politics*'. Sehingga menjamin terselenggaranya negara tanpa berhadap-hadapan dengan agama, dan menjamin agama tidak ditinggalkan oleh negara.¹⁸³ Sejak didirikannya (1344 H./1926 M.) sampai berakhirnya penjajahan Belanda (1361 H./1942.) Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi keagamaan bergerak membina umat menurut wawasan keagamaannya yang memang sesuai dengan wawasan keagamaan mayoritas kaum muslimin Indonesia.

Cita-cita dan langkah Nahdlatul Ulama sejak didirikan bertumpu pada gerakan *ishlaah* (perbaikan dan peningkatan kebaikan). Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional sekarang ini. Yaitu Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama berpartisipasi aktif dan

¹⁸² *Ibid.*, 39.

¹⁸³ Yusuf, "*Kehilangan Penggagas Fikih Sosial*", Surya, (25, 01-2014), 1.

positif dalam gerak pembangunan bangsa dan negara, bukan saja sebagai pemenuhan kewajiban nasional, tetapi juga sebagai kewajiban keagamaan dan sebagai usaha merealisasikan cita-citanya sendiri.¹⁸⁴

Sejarah membuktikan, pada dasarnya nasionalisme itu lahir sebagai respon terhadap kolonialisme. Dalam keadaan terjajah selalu mengorbankan slogan kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), dan persaudaraan (*fraternite*). Dalam konteks demikian, nasionalisme menjadi sama dan sebangun dengan demokrasi.¹⁸⁵ Di samping itu, pada zaman revolusi, NU telah menfatwakan “resolusi jihad” melawan Inggris dan Belanda pada tahun 1945, dalam rangka mempertahankan eksistensi Republik Indonesia.¹⁸⁶

Lebih lanjut, orientasi kenegaraan nasional dari konsep nasionalisme ini menampilkan diri pertama-tama dan terutama sebagai suatu gerakan kemerdekaan dari dominasi kolonial dan baru kemudian sebagai gerakan demokrasi. Karena itu nasionalisme bukanlah sesuatu yang begitu saja jatuh dari langit, akan tetapi ada akar historinya.¹⁸⁷

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Nasionalisme adalah sebuah paham yang direalisasikan dalam sebuah gerakan yang mendambakan

¹⁸⁴ *Ibid.*, 68.

¹⁸⁵ Ali Maschan Moesa, *Nu Agama Demokrasi*, (Surabaya : Pustaka Da’i Muda, 2002), 39.

¹⁸⁶ *Ibid.*, 41.

¹⁸⁷ *Ibid.*, 227.

kepentingan bersama, yaitu kepetingan bangsa (*nation*), walaupun mereka terdiri dari masyarakat yang majemuk.¹⁸⁸

Ketika didirikan tahun 1945, Indonesia sebagai *nation-state* 1945 telah memilih bentuk dan prinsip hidup bernegara yang sangat fundamental yaitu negara kesatuan yang demokratis sebagaimana pasal 1 UUD 1945. Dengan demikian, berdasarkan UUD tersebut pemerintah Indonesia pertama, bertugas membangun negara kesatuan yang mampu mengatasi ikatan-ikatan kelompok dan golongan agar tetap utuh sebagai *nation*. Kedua, membangun masyarakat demokratis dan pluralistik, yang mampu menghindarkan dari mekanisme *zero-sum game*.¹⁸⁹

Kemudian, perlu dikemukakan bahwa nasionalisme terdiri atas dua aspek, yaitu: pertama, *resorgimento* dan integral yang mengacu kepada upaya pembebasan dari tekanan-tekanan sosial dan politik. Kedua, kategori *reservationist*, yakni kelompok masyarakat yang ingin mempertahankan status quo.¹⁹⁰

Dalam konteks ini, para kiai mengajukan solusi dengan mengamalkan konsep tri *ukhuwwah*. Seperti, konsep *ukhuwwah* yang dikembangkan Kiai Achmad Siddiq adalah sebagai berikut: (a) *Ukhuwwah Islamiyah*, yaitu *ukhuwah*

¹⁸⁸ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai*, 28.

¹⁸⁹ Ali Maschan Moesa, *Nu Agama Demokrasi*, (Surabaya : Pustaka Da'i Muda, 2002), 274.

¹⁹⁰ *Ibid.*, 279.

yang tumbuh dan berkembang karena persamaan kemanan atau keagamaan, baik di tingkat nasional maupun internasional, (b) *Ukhuwah wataniyyah*, yaitu *ukhuwwah* yang tumbuh dan berkembang atas dasar rasa nasionalisme, (c) *Ukhuwwah Insaniyah (basyariyyah)*, yaitu *ukhuwwah* yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan.¹⁹¹

Memang Konsepsi Relasi Islam dan nasionalisme dalam bernegara tidak semalanya membawa ke ranah (*mabadi' khairah ummah*). Sebab, pada satu dasa warsa 1920-1930 yang kemudian akan berpengaruh dalam pertumbuhan keagamaan dan dasar ideologi perjuangan. Gagasan Soekarno, bahwa agama dapat dan harus dipisahkan dari negara dan pemerintahan, sebab agama merupakan aturan-aturan spiritual (akhirat dan negara adalah masalah duniawi (sekular). Sedangkan menurut Natsir sangat meyakini kebenaran Islam sebagai suatu ideologi kenegaraan. Akan tetapi hal ini tidak bisa dijadikan pijakan utama. Sebab *Ukhuwwah Islamiyah*, *Ukhuwah wataniyyah*, *Ukhuwwah basyariyyah* sebagai jalan awal untuk bernasionalisme.

Meski nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di pahami sebuah gerakan yang mendambakan kepentingan bersama, yaitu kepentingan bangsa (*nation*), walaupun mereka terdiri dari masyarakat yang majemuk, tetapi dalam kehidupan masa kini bahwa bangsa dan negara sedang di ombang-bing dengan persoalan konflik agama dan negara. Contoh:

¹⁹¹ Syamsun Ni'am, *The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq*, 88.



Munculnya laskar Jihad yang dibentuk oleh *Forum Komunikasi Ahlusunnah Wal Jamaah* (FKAJ) yang beranggotakan 10.000 orang, dan melakukan tablig akbar di senayan dan melakukan unjuk rasa untuk menyatakan kekecewaan terhadap pemerintah atas lambannya penanganan konflik sosial di Maluku.¹⁹² Selain itu, kekerasan dengan mentasnamakan agama mulai marak di Indonesia.

Dan dengan memisahkan agama dari negara adalah jalan tengah dan dapat menemukan satu jalan yang luas dan sanggup memecahkan seluruh problema dengan cepat dan kuat untuk mencapai kestabilan, serta umat dapat dibebaskan dari pertumpahan darah yang terus meenrus dilancarkan oleh pemuka-pemuka agama terhadap orang-orang yang menentangnya.¹⁹³

Akan tetapi jika kita berbuat arif maka akan timbul konflik baru. Sebab peran agama dalam masyarakat kita telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan ke-Indonesiaan itu sendiri. Dalam konteks masyarakat politik, dengan sendirinya pula, peranan politis agama-agama tersebut menjadi bagian pula dari sejarah bangsa kita. Masuknya agama-agama Katolik dan Kristen Protestan, dan lahirnya organisasi-organisasi keagamaan dalam bidang sosial dan

¹⁹² Sudirman Tebba, *Islam Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana), 2001), 125.

¹⁹³ Mushthafa As Siba'ie, *Agama dan Negara Stduy perbandingan Antara Yahudi-Kristen-Islam*, 1978), 1.

politik serta ide-ide nasionalisme yang lebih artikulatif dan konsepsional di masa-masa menjelang kemerdekaan Indonesia.¹⁹⁴

¹⁹⁴ Fachry Ali, *Golongan Agama dan Etika kekuasaan Keharusan Demokratisasi dalam Islam Indonesia*, (Surabaya : Risalah Gusti), 207.